

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, H. 2018. Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen. Gowa: CV Gunadarma Ilmu, Cetakan I
- Abubakar, H. Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Apeldoorn, Van. 2015. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Ketiga Puluh Lima.
- Arto, Mukti. 2017. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kesembilan
- Asikin,Zainal. 2015. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bentham, Jeremy. 2019, Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Nuansa Cendekia
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga
- Fathurrohman, Muhammad, dan Sulistyorini. 2012. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik. Yogyakarta: Teras.
- Friedman, W. 1994, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta:Rajawali.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Islamy,M.Irfan. 2014 Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika
- Majid, Abdul. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis. Bandung: Interes Media.
- Manan, Abdul. 2017. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Margono. 2012. *Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 2020, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan III

- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi, Ismail. 2017. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya:ITS Press
- Neng, Zubaidah. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penlenitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sholihin A W. 2014. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta. Cetakan II
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta
- Suharsono. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2017. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Skripsi

- Januartika, Gede Pupung. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Sardi, Muhamad Aziz. 2017. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan Dalam Perkara Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan (Studi Putusan Nomor

Jurnal

- Bukido, Rosdalina. 2019. Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai. 5,(2). 147-148
- Dantes, Komang Febrinayanti. Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2023. Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015di Kabupaten Tabanan. 9, (1) 564-572
- Faizal, Liky. 2016. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. 8,(2). 65
- Kusumaningrum, Arum. 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. 1,(6). 1-10
- Mahardika, I Made Dwi. Dkk. 2022. Perceraian Bagi Masyarakat Hindu DiBali Yang Tidak Mempunyai Akta Perkawinan. 3, (3). 505
- Mangu. D.G.S. Yuliantini. N.P. Rai. 2020. Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. 8, (1). 139-140
- Munawar, Akhmad. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. VII, (13). 23
- Muqaddas, Busyro. 2002. “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Yogyakarta. 21
- Nasriyan, Iyan. 2019. Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. 10, (02). 88
- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*. 3, (2). 120-121
- Noormansyah, Doddy. 2006. “*Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. 7, (1). 10
- Prahara, Erwin. 2018. Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugatdalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai, *Jurnal USM Law Review*. 1, (1). 1-14
- Prayogo, R. Tony. 2016. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13. (2). 194
- Respationo, Soerya. 2013. “*Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum*”, *Jurnal Hukum Yustisia*. No 86. 43

- Sudiatmaka, Ketut. Dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. 4, (2). 682-291
- Sukma, Made Anggia Pramita. 2019. ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG. Jurnal Satyagraha. 02, (01). 35-45
- Wantu, Fence M. 2007. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum. 19, (3). 388-395
- Warassih, Esmi. 1991, Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, halaman 85.
- Wijayanta, Tata. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. 14, (2). 219
- Yani, Pande Putu Gita. Dkk. 2021. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali. 2, (1). 152-153

Website

<https://tarubali.baliprov.go.id>

<https://www.pn-singaraja.go.id>

- Seraya, I. M. A. (2019). Pengadilan Tidak Lagi Menerima Perkara Perceraian? “Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Catatan Sipil”. <http://www.baliadvocate.com/artikel/pengadilan-tidak-lagi-menerima-perkara-perceraian/>. (Diakses pada tanggal 30 Juni 2023)